



DKI Batalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Nur Haryanto

anto@tempo.co.id

JAKARTA— Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya memutuskan membatalkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Pembatalan ini terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menilai ada kejanggalan dalam proses jual-beli lahan tersebut. Sebelumnya, DKI telah membayar Rp 880 miliar untuk lahan tersebut.

“Kami batalkan karena bagaimana bisa melawan yang ‘mahakuasa,’” kata Basuki di Balai Kota, kemarin, merujuk pada temuan BPK. Meski demikian, Basuki kukuh menyatakan pembelian lahan seluas 3,7 hektare itu sudah sesuai dengan banderol nilai jual obyektif pajak (NJOP). Namun, dalam catatan BPK, pemerintah DKI membeli lahan itu tanpa melalui proses taksir harga (appraisal) dan menemukan kemahalan harga Rp 191 miliar.

Langkah pemerintah DKI membayar harga lahan, menurut Basuki, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa untuk pembelian tanah di bawah 5 hektare, selama harganya mengikuti harga appraisal dan bersertifikat, pemerintah bisa langsung membelinya. Berdasarkan aturan itu, pemerintah langsung membeli lahan RS Sumber Waras pada 2014.

Meski pembelian dibatalkan, Gubernur Basuki tetap akan membeli lahan itu kembali. Namun pembelian itu akan dilakukan lewat skema taksir harga. Menurut Basuki, har-

ganya nanti akan jauh lebih mahal ketimbang nominal yang pernah dibayarkan kepada RS Sumber Waras. “Ya sudah kalau lebih mahal, saya akan beli lagi, salah lagi, temuan lagi,” ujar Basuki.

Untuk melanjutkan proses pembatalan, pemerintah DKI Jakarta akan memanggil perwakilan Rumah Sakit Sumber Waras hari ini. “Memang sudah dibatalkan, tapi Sumber Waras perlu diberi kabar juga,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono.

Heru menambahkan, pemanggilan pihak Sumber Waras juga untuk memastikan skema pengembalian uang yang sudah dibayarkan pemerintah DKI. Tapi, menurut dia, hal ini tak mudah. “Uangnya pasti sudah tersebar ke mana-mana,” dia berujar.

Lahan Sumber Waras sebelumnya telah dilirik oleh swasta untuk dijadikan bangunan komersial.

Namun Joko Widodo, saat menjadi Gubernur DKI, melarang bekas area rumah sakit dan pendidikan dijadikan lahan komersial. “Untuk menghindari kebangkrutan, Pemprov bantu RS dengan belinya,” kata Basuki.

Kondisi rumah sakit itu kini memang sekarat. Bangunannya tampak tak terawat. Di beberapa bagian bangunan, catnya mengelupas dan kusen kusam. Tak banyak pasien atau pengunjung terlihat seperti di rumah sakit pada umumnya. Ruang gawat darurat rumah sakit, yang biasanya paling sibuk, pun tak ada satu pasien baru, kemarin. Pihak Yayasan Sumber Waras belum bisa ditemui untuk konfirmasi.

Kisruh pembelian lahan RS Sumber Waras mencuat setelah pemberian predikat “wajar dengan pengecualian” oleh BPK pada laporan keuangan

DKI 2014. Hal itu menyusul adanya 70 temuan pertanggungjawaban anggaran yang diduga bermasalah dengan nilai mencapai Rp 2,16 triliun.

Lembaga audit anggaran itu menyebutkan ada Rp 442 miliar yang terindikasi merugikan daerah. Sedangkan potensi kerugian daerah Rp 1,71 triliun. Ada juga kekurangan penerimaan daerah Rp 3,23 miliar. Belanja administrasi yang kemahalan Rp 469 juta serta pemborosan Rp 3,04 miliar.

● RAYMUNDUS RIKANG | YOLANDA RYAN ARMINDYA

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap alasan pembelian lahan 3,7 hektare oleh pemerintah Jakarta untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat bermasalah. Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramadan, selain harga belinya, tahap-tahap pembeliannya juga kacau.

1 Penganggaran pengadaan tanah DKI tidak sesuai dengan ketentuan.

2 Disposisi pelaksana tugas Gubernur DKI yang memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menganggarkan pembelian tanah tidak sesuai dengan ketentuan.

3 Pemerintah Jakarta tidak melakukan studi kelayakan dan kajian teknis dalam penentuan lokasi.

4 Pembelian tanah masih terikat perjanjian jual-beli oleh pihak lain.

5 Dalam penyerahan fisik tanah dari yayasan ke pemerintah, terdapat selisih harga hingga Rp 484,6 miliar.

6 Yayasan menyerahkan akta pelepasan hak pembayaran sebelum melunasi tunggakan PBB.

● SINGGIH SOARES